



EKONOMI DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA

Budhi Bawono¹, Julia Surya², Dama Vidya³, Eko Suryanto⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Smaratungga

Budhi2019@sekha.kemenag.go.id¹, juliasurya@smaratungga.ac.id², dhammadvidya8@gmail.com³, ekosuryanto82@gmail.com⁴

Riwayat Artikel:

Diterima : 17 Desember 2023

Diterbitkan : 31 Desember 2023

Direvisi : 28 Desember 2023

Doi: [10.53565/patisambhida.v4i2.1057](https://doi.org/10.53565/patisambhida.v4i2.1057)

Abstrak

Artikel ini menggali konsep ekonomi dalam agama Buddha dengan fokus pada Suttapiṭaka, filsafat ekonomi Buddha, perbandingan dengan ekonomi kapitalis, dan pandangan terhadap pengumpulan kekayaan. Agama Buddha memberikan panduan melalui konsep mata pencaharian benar, yang mencerminkan delapan unsur Jalan Mulia, dengan penekanan pada usaha yang jujur, keterampilan, dan non-eksploitasi. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dari artikel jurnal, buku relevan, dan kitab suci Agama Buddha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ekonomi dalam Suttapiṭaka mencerminkan nilai-nilai etika untuk menciptakan harmoni dan mengurangi penderitaan. Ajaran Buddha mendorong kesederhanaan, menolak kekerasan, dan mengedepankan kemurahan hati dalam praktik ekonomi. Dalam perbandingan dengan ekonomi kapitalis, artikel menyoroti perbedaan mendasar dalam prinsip dan tujuan. Ekonomi kapitalis menekankan pengejaran kekayaan sebagai tujuan utama, sedangkan ekonomi Buddha mengadvokasi keseimbangan antara kesejahteraan materi dan spiritual, serta pemberdayaan kesejahteraan bersama. Pandangan Buddhis terhadap pengumpulan kekayaan menekankan pada pengurangan penderitaan dan perlindungan diri dari perbuatan tercela. Implikasi penelitian ini adalah memberikan landasan bagi masyarakat dalam mengelola kekayaan dengan etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi, serta memberikan kontribusi pada pemahaman ekonomi Buddha dalam konteks praktik sehari-hari dan dunia bisnis.

Kata kunci: Ekonomi, Mata Pencaharian, Kapitalis, Kekayaan

Abstract

This article delves into the economic concepts within the Buddhist religion, focusing on the Suttapiṭaka, Buddhist economic philosophy, a comparison with capitalist economics, and perspectives on wealth accumulation. Buddhism provides guidance through the concept of Right Livelihood, reflecting the eightfold path's ethical elements, with an emphasis on honest effort, skill, and non-exploitation. The research methodology involves a literature review of journal articles, relevant books, and Buddhist scriptures. The research findings indicate that the economic concepts in the Suttapiṭaka reflect ethical values aimed at creating harmony and reducing suffering. Buddha's teachings promote simplicity, reject violence, and emphasize compassion in economic practices. In comparison to capitalist economics, the article highlights fundamental differences in principles and objectives. Capitalist economics emphasizes the pursuit of wealth as the primary goal, while Buddhist economics advocates a balance between material and spiritual well-being, along with the empowerment of collective welfare. Buddhist views on wealth accumulation emphasize reducing suffering and protecting oneself from unethical actions. The implications of this research provide a foundation for society to

manage wealth with high ethical standards and social responsibility. It also contributes to understanding Buddhist economics in the context of daily practices and the business world.

Keywords: *Economy, Livelihood, Capitalism, Wealth*

PENDAHULUAN

Agama Buddha memberikan dua pilihan jalan hidup yang dapat diambil, yaitu menjalani peran sebagai seorang perumah tangga atau menjalankan peran sebagai seorang samana. Individu yang memutuskan untuk menjalani kehidupan sebagai perumah tangga, dapat dipahami bahwa perjalanan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika masalah ekonomi (Haudi et al., 2021). Manajemen ekonomi memiliki relevansi yang tinggi bagi semua komunitas manusia, terutama bagi penganut agama Buddha. Pemahaman dan penerapan totalitas prinsip-prinsip ini dalam kegiatan ekonomi sehari-hari mungkin tidak selalu komprehensif. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Buddhisme* dalam pengelolaan ekonomi keluarga, dapat memastikan bahwa ini memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk kehidupan di masa depan (Hermawan & Candra, 2019).

Agama Buddha tidak secara khusus mengajarkan disiplin ilmu ekonomi, namun prinsip moral dan agama yang diajarkannya menjadi landasan bagi pemahaman ekonomi dari perspektif para penganut agama Buddha (Mukti, 2020). Schumacher dalam (Mukti, 2020) menyimpulkan bahwa keberadaan ilmu ekonomi dalam konteks agama Buddha dapat dipastikan ada. Mata pencaharian atau penghidupan yang benar merupakan salah satu dari delapan unsur Jalan Mulia dalam ajaran agama Buddha. Konsep sila dalam konteks ini terdiri dari tiga unsur utama, yaitu ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar (Ningtyas, 2023).

Dominasi dan perkembangan sistem ekonomi kapitalis yang liberal dari dunia Barat telah meluas ke hampir semua lapisan masyarakat, mengakibatkan munculnya pola hidup konsumtif dan pandangan materialistik (Haudi et al., 2021). Konsep dari pandangan ekonomi kapitalis sangatlah berbeda dengan pandangan ekonomi dalam pandangan agama Buddha. Ekonomi Buddhis menawarkan pendekatan spiritual terhadap ekonomi, menekankan pengembangan pribadi, pengembangan masyarakat, dan kepedulian terhadap lingkungan (Zinchenko & Boichenko, 2022). Ekonomi tidak terlepas dari hal kekayaan, dan mencapai kekayaan bukanlah hal yang buruk.

Agama Buddha tidak melarang umat perumah tangga untuk mendapatkan kekayaan dan menganggap wajar jika setiap individu berupaya memperoleh kekayaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ajaran Buddha menekankan bahwa proses perolehan kekayaan seharusnya sejalan dengan prinsip Dhamma, yang berarti bahwa kekayaan sebaiknya diperoleh melalui usaha yang jujur dan keterampilan, tanpa eksplorasi (Haudi et al., 2021). Kata lain untuk mendapatkan kekayaan harus melalui mata pencaharian yang benar. Tolak

ukur baik atau tidaknya suatu mata pencaharian dapat dilihat dari dampak yang dihasilkannya, di mana mata pencaharian dianggap baik jika mampu memberikan manfaat baik untuk diri sendiri, orang lain, atau keduanya.

Artikel ini memiliki kebaharuan dalam mengkaji ekonomi dalam *suttapitaka*. Salah satu yang membedakan artikel ini yaitu pembahasan dalam ekonomi filsafat dalam sudut pandang agama Buddha, perbedaan ekonomi kapitalis dengan ekonomi Buddha dan pengumpulan kekayaan dalam pandangan agama Buddha. Manfaat dengan adanya artikel ini dapat memberikan wawasan baru mengenai ekonomi dalam sudut pandang *suttapitaka* agama Buddha. Pengkajian artikel yang ditulis oleh Haudi, dkk. (2021) mengenai ekonomi hanya menjelaskan tentang konsep ekonomi dalam pandangan agama Buddha. Artikel yang ditulis oleh Wijoyo & Nyanasuryanadi, (2020) hanya menjelaskan mengenai etika berwirausaha dalam pandangan agama Buddha. Selain itu, masih kurangnya sumber literasi tentang ekonomi filsafat dan pengumpulan kekayaan dalam sudut pandang *suttapitaka* agama Buddha. Hasil dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai ekonomi dalam sudut pandang agama Buddha. Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai ekonomi dalam perspektif agama Buddha, dengan harapan dapat mengatasi permasalahan dalam berwirausaha dan menjaga kekayaan.

METODE

Artikel ini merupakan pengkajian ekonomi dalam pandangan *suttapitaka*. Metode dalam penulisan ini yaitu menggunakan studi pustaka atau *library research*. Penulisan artikel ini berangkat dari pengumpulan sumber artikel jurnal, buku yang relevan dan kitab suci Agama Buddha. Sumber yang telah dikumpulkan menjadi dasar dalam penulisan artikel ini, sehingga menjadikan kajian ekonomi dalam pandangan *suttapitaka* ini sangatlah baik untuk dijadikan rujukan dalam penelitian atau kajian yang akan datang

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Ekonomi Buddha

Konsep ekonomi dalam agama Buddha tidak terlepas dari mata pencaharian benar. Mata pencaharian atau penghidupan yang benar adalah salah satu dari delapan unsur Jalan Mulia didalam agama Buddha (*A.IV.285*). Individu yang menjalankan penghidupan secara benar tidak akan merugikan makhluk lain. Ada banyak mata pencaharian yang baik, yang tidak mencelakakan, tidak menyakiti atau membuat pihak mana pun menderita. Sang Buddha memperhatikan baik buruknya suatu barang diperdagangkan, sehubungan dengan ajaran tentang *sila*. Terdapat lima jenis perdagangan yang harus dihindari, yaitu berdagang senjata, makhluk hidup, daging, minuman keras dan racun (*A.III.207*).

Mukti (2020) menyampaikan bahwa pengadaan dan transaksi senjata serta zat racun dikaitkan dengan tindakan kejahatan, terutama dalam konteks pembunuhan, kekerasan, atau penyiksaan. Perdagangan makhluk hidup, seperti praktik perbudakan, penjualan bayi atau anak-anak, serta perdagangan wanita, termasuk dalam kategori tindak kejahatan. Demikian pula, menjual binatang tidak dapat dibenarkan, terutama jika tujuannya adalah untuk disembelih. Dalam konteks kategori daging, segala produk yang berasal dari perlakuan kejam terhadap binatang termasuk dalam larangan. Kategori minuman keras mencakup narkotika, obat psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Di samping itu, terdapat lima bentuk kehidupan yang dianggap tidak benar, yakni hidup dengan cara menipu orang lain (*kuhana*), berbohong atau menyombongkan diri (*lapana*), memeras dengan cara menyindir atau memfitnah (*nemittakata*), melakukan kecurangan atau menyulap (*nippesikata*), dan mencari keuntungan berlebihan (*labha*) (M.III.75).

Konsep ekonomi dalam *Suttapiṭaka* mencerminkan serangkaian nilai-nilai etika yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan meminimalkan penderitaan dalam kegiatan ekonomi. Ajaran Buddha mendorong kesederhanaan, menolak kekerasan, dan mengedepankan perhatian dan kemurahan hati yang tulus dalam praktik ekonomi. Tujuan utama ekonomi Buddha adalah mencapai moralitas dan kebahagiaan, di mana kekayaan diperoleh dan dilestarikan dengan memperhatikan kepentingan tidak hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Prinsip-prinsip ekonomi Buddha menekankan penggunaan sumber daya ekonomi dengan tanggung jawab, sehingga tidak merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan (Husaini & Nadifah, 2023). Dalam pandangan ini, ekonomi tidak hanya diartikan sebagai akumulasi materi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan spiritual dan kesejahteraan sosial. *Suttapiṭaka* memberikan panduan yang jelas untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Buddha, memastikan bahwa kekayaan diperoleh dan dimanfaatkan secara etis untuk mencapai tujuan spiritual dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, konsep ekonomi dalam *Suttapiṭaka* tidak hanya mengajarkan praktik ekonomi yang bijaksana tetapi juga memberikan fondasi moral yang kokoh untuk memandu individu dalam pengelolaan kekayaan dan sumber daya ekonomi (Haudi et al., 2021 ; Wijoyo & Nyanasuryanadi, 2020).

2. Konsep Ekonomi Filsafat

Pandangan ekonomi dalam filsafat, pernyataan Zinchenko & Boichenko (2022) menyoroti kemungkinan adopsi rasionalitas ekonomi yang serupa dengan ajaran Buddha oleh masyarakat non-Buddhis. Ini mencerminkan pendekatan dalam filsafat ekonomi yang mempertimbangkan nilai-nilai dan etika dalam pengembangan sistem ekonomi. Dengan merujuk pada etika kelangsungan hidup manusia, termasuk konsep bioetika yang diusulkan oleh Van Rensselaer Potter, mereka mengindikasikan bahwa pertimbangan etis dalam ekonomi tidak terbatas pada batasan agama atau keyakinan.

Pandangan ini juga mencerminkan keragaman aliran pemikiran dalam filsafat ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya, di mana nilai-nilai etika dan pertimbangan sosial memainkan peran penting. Selain itu, Zinchenko & Boichenko (2022) menunjukkan bahwa, meskipun masyarakat non-Buddhis mungkin tidak membangun ekonomi secara langsung berdasarkan ajaran Buddha, adopsi rasionalitas ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Buddha tetap mungkin. Pentingnya pertimbangan etis dalam ekonomi, yang mencakup keadilan distributif dan tanggung jawab sosial, juga dapat ditemukan dalam pembahasan mengenai filsafat ilmu ekonomi. Landasan aksiologi dalam filsafat ilmu, yang membahas nilai-nilai dan tujuan di dalam ilmu ekonomi, dapat menjadi dasar untuk memahami keterkaitan antara nilai-nilai etika, ajaran agama, dan pengembangan sistem ekonomi.

Filsafat Buddha menyoroti konsep non-keterikatan terhadap kepemilikan material dan ketidakkekalan, menciptakan landasan untuk pendekatan minimalis terhadap masalah ekonomi. Dalam perspektif Buddha, kekayaan materi tidak bersifat abadi dan tidak dapat memberikan kebahagiaan sejati. Dalam ajaran Buddha, konsep "mata pencaharian yang benar" mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Hal ini berarti memilih mata pencaharian yang tidak merugikan orang lain atau lingkungan, menciptakan dasar untuk praktik ekonomi yang bertanggung jawab. Konsep Buddhis tentang saling ketergantungan mengakui hubungan erat antara semua makhluk, mendorong rasa tanggung jawab bersama dan kerja sama dalam kegiatan ekonomi. Dalam perspektif ini, tindakan ekonomi individu dapat memiliki dampak yang lebih luas pada masyarakat dan lingkungan.

Ajaran Buddha juga menekankan pentingnya kemurahan hati dan pemberian. Ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk redistribusi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam konsep "dana" atau pemberian sukarela, ekonomi Buddha mempromosikan gagasan berbagi sumber daya dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Secara keseluruhan, filsafat Buddha membentuk dasar bagi pendekatan ekonomi yang lebih etis, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip seperti non-keterikatan, mata pencaharian yang benar, saling ketergantungan, kemurahan hati, dan pemberian menjadi landasan untuk praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Buddha (Maitriya, 2022).

3. Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis didasarkan pada prinsip kepemilikan pribadi dan persaingan di pasar bebas (Zainol Hasan & Mahyudi, 2020 ; Husaini & Nadifah, 2023). Kapitalisme merupakan istilah yang terkait dengan konsep "Modal" mengacu pada dana dan aset seperti uang dan tanah yang menjadi sumber produksi. Menurut Oxford, Kapital memiliki berbagai makna, termasuk uang yang digunakan untuk memulai bisnis, individu yang

menggunakan uang mereka untuk memulai bisnis, total kekayaan individu atau perusahaan, dan kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan lebih banyak kekayaan (Zainol Hasan & Mahyudi, 2020). Ini mempromosikan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kebebasan finansial individu (Fauziah & Sarkani, 2023). Namun, hal itu juga menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan, ketidaksetaraan sosial, dan dampak lingkungan.

Menurut Monzer Kahf filosofi di balik sistem ekonomi Kapitalis mencerminkan konsep 'laissez faire' dan "tangan yang tak terlihat," menunjukkan bahwa individu tidak terbatas dalam mengejar keuntungan pribadi. Pemikiran ini menyatakan bahwa kebebasan manusia dalam mengejar keinginan mereka sendiri akan menghasilkan kesejahteraan yang merata bagi semua individu. Sistem Ekonomi Kapitalis dijelaskan sebagai "sistem organisasi ekonomi dengan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan distribusi (seperti tanah, pabrik, jalan, dll.) yang dimanfaatkan untuk meraih keuntungan dalam kondisi persaingan yang ketat (Suaidi, 2023).

Kontrast antara konsep ekonomi kapitalis dan ajaran Buddha mencerminkan perbedaan mendasar dalam prinsip dan tujuan. Ekonomi kapitalis, didasarkan pada materialisme, mendorong pengejaran kekayaan dan kepemilikan sebagai tujuan utama (Kurniawan, 2017). Fokusnya terpusat pada keuntungan individu dan akumulasi modal sebagai ukuran keberhasilan ekonomi. Sebaliknya, ajaran Buddha menekankan prinsip jalan tengah, sebuah pendekatan yang mengakui pentingnya kesejahteraan materi tanpa menolak nilai-nilai spiritual. Buddha mengajarkan bahwa keterikatan berlebihan pada kekayaan dan harta dapat menjadi hambatan dalam mencapai pembebasan spiritual. Oleh karena itu, ajaran Buddha menawarkan konsep ekonomi yang seimbang, mengajak individu untuk mengejar kegiatan ekonomi tanpa menyebabkan kerusakan pada diri sendiri atau orang lain.

Tujuan konsep ekonomi Buddha bukan hanya mencapai kebahagiaan pribadi, tetapi juga kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Pendekatan ini memandang keberhasilan ekonomi tidak hanya dari segi akumulasi materi, tetapi juga dari dampak positifnya pada masyarakat dan lingkungan. Ajaran Buddha mendorong individu untuk mengembangkan sikap kemurahan hati, berbagi sumber daya, dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merugikan pihak lain (Mukti, 2020 ; Haudi et al., 2021 ; Wijoyo & Nyanasuryanadi, 2020 ; Hermawan & Candra, 2019)

4. Kekayaan Pandangan Buddha

Orang miskin sering kali menghadapi kesulitan finansial yang memaksa mereka terlibat dalam utang, membayar cicilan dan bunga sebagai beban tambahan. Ketidakmampuan membayar tagihan yang jatuh tempo dapat mengakibatkan tekanan, perlakuan kasar, bahkan penangkapan atau penjara, menyerupai kondisi orang yang kurang memiliki

keyakinan dan kehati-hatian (*A.III.352*). Beban utang tidak hanya mengganggu secara finansial, tetapi juga dapat mengganggu ketenteraman batin. Buddha mengaitkan utang dengan rintangan batin, seperti penyakit, penjara, perbudakan, atau perjalanan melalui hutan yang angker (*D.I.72-73*). Meskipun utang dapat memberikan kekayaan, seringkali malah membuat orang semakin miskin dan terjerumus dalam penderitaan.

Buddha menekankan bahwa kebahagiaan berasal dari hasil usaha sendiri (*atthi-sukha*) dan kekayaan yang dapat dimanfaatkan (*bhoga-sukha*) belum cukup; kebahagiaan sejati dinikmati ketika tidak ada utang (*anana-sukha*) dan tidak melakukan perbuatan tercela (*anavajja-sukha*) (*M.I.68*). Berutang bisa menimbulkan penderitaan baik pada masa sekarang maupun di masa depan. Buddha mengajarkan bahwa bijaksana menilai apakah suatu perbuatan membawa kebahagiaan atau penderitaan, yang paling baik memberikan kebahagiaan pada masa sekarang maupun masa depan (*D.III.229*). Untuk menikmati kebahagiaan sekarang dan di masa depan, seseorang harus melindungi diri dari perbuatan tercela, meminta bantuan, atau berutang kepada orang yang pintar, memiliki keahlian, dan dapat dipercaya (*A.I.116*). Hermawan & Candra (2019) menyampaikan bahwa agama Buddha tidak secara kategoris melarang umat awam untuk memiliki kekayaan; namun, yang lebih penting adalah praktik Paramitta, yaitu memberikan bantuan kepada yang miskin dari kekayaannya sambil tetap memegang teguh moralitas dan disiplin.

Pandangan Buddhis terhadap pengumpulan kekayaan bagi para pemilik rumah menekankan pada pengurangan penderitaan daripada semata-mata memaksimalkan utilitas dan keuntungan. Ajaran Buddha menyoroti nilai kemurahan hati dan rasa bersyukur, serta menekankan perlunya memenuhi kebutuhan dasar manusia tanpa terjebak dalam keinginan konsumen yang berlebihan. Dalam konteks kegiatan ekonomi, ajaran Buddha bertujuan untuk membawa hasil yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri tetapi juga orang lain. Ini mempromosikan kerja sama dan perilaku etis dalam bisnis, menekankan bahwa keberhasilan ekonomi sejati mencakup kesejahteraan bersama.

Pengusaha dalam pandangan Buddhis didorong untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pekerjaan yang bermakna dan menguntungkan. Selain itu, mereka diharapkan untuk memperhatikan pengembangan spiritual dan kehidupan keluarga yang baik bagi karyawan. Tidak hanya itu, pengusaha juga diingatkan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap karyawan, pemangku kepentingan, dan lingkungan. Dengan pendekatan ini, ajaran Buddha membentuk landasan untuk praktik ekonomi yang memperhitungkan kesejahteraan holistik, bukan hanya dalam konteks material tetapi juga spiritual dan sosial. Dalam pandangan Buddhis, kesuksesan ekonomi sejati adalah ketika kekayaan dikumpulkan dengan penuh pertimbangan terhadap penderitaan manusia, etika bisnis yang tinggi, dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan

demikian, perbedaan mendasar antara ekonomi kapitalis dan konsep ekonomi Buddha mencerminkan perbedaan dalam nilai-nilai yang dijunjung tinggi, di mana ekonomi Buddha mengarah pada keseimbangan antara kesejahteraan materi dan spiritual, serta pemberdayaan kesejahteraan bersama (Wijoyo & Nyanasuryanadi, 2020).

KESIMPULAN

Ajaran Buddha menawarkan pendekatan spiritual terhadap ekonomi dengan menitikberatkan pada pengembangan pribadi, masyarakat, dan kepedulian terhadap lingkungan. Mata pencarian yang benar, sesuai dengan prinsip Dhamma, menjadi fokus utama, di mana perolehan kekayaan seharusnya dilakukan melalui usaha yang jujur, keterampilan, dan tanpa eksplorasi. Konsep non-keterikatan terhadap materi, kemurahan hati, dan pemberian juga menjadi dasar praktik ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini mengungkap perbedaan mendasar antara ekonomi kapitalis dan pandangan ekonomi Buddha, di mana ekonomi kapitalis menekankan pengejaran kekayaan sebagai tujuan utama, sementara ekonomi Buddha mengadvokasi keseimbangan antara kesejahteraan materi dan spiritual, serta pemberdayaan kesejahteraan bersama. Implikasi dari temuan ini dapat memberikan landasan bagi masyarakat dalam mengelola kekayaan dengan etika dan tanggung jawab sosial yang tinggi, dan penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi implementasi nilai-nilai ekonomi Buddha dalam konteks praktik ekonomi sehari-hari dan dunia bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ānguttara Nikāya : Khotbah-Khotbah Numerikal Sang Buddha Jilid 1.* 2015. Indra Anggara (Trans.). Jakarta: DhammaCitta Press.
- Ānguttara Nikāya : Khotbah-Khotbah Numerikal Sang Buddha Jilid 3.* 2015. Indra Anggara (Trans.). Jakarta: DhammaCitta Press.
- Ānguttara Nikāya : Khotbah-Khotbah Numerikal Sang Buddha Jilid 4.* 2015. Indra Anggara (Trans.). Jakarta: DhammaCitta Press.
- Digha Nikāya : Khotbah - khotbah Panjang Sang Buddha.* Team Giri Mangala Publication & Team DhammaCitta Press (Trans.). Jakarta : DhammaCitta Press.
- Fauziah, D. R., & Sarkani. (2023). Analisis Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis Dengan Ekonomi Islam (Vol. 6, Issue 2).
- Haudi, Rudy, & Grace. (2021). Konsep Ekonomi Dalam Perspektif Buddhis. *Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan Agama Buddha*, 3(1).
- Hermawan, H., & Candra, A. (2019). Ekonomi Buddhis Kehidupan Bahagia Tinjauan Anguttara Nikaya, IV:285. *Jurnal Dhammadvicaya*, iii(2), 1–6.

- Husaini, M., & Nadifah, N. A. (2023). Konsep Ekonomi Dan Perbandingannya Antara Kapitalis, Sosialis Dan Islam. <https://www.ejournal.smaamc.sch.id/index.php/belajar>
- Kurniawan, I. D. (2017). Sistem Kapitalisme Negara Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila (Vol. 01, Issue 02).
- M. (n.d.). *Majjhima Nikāya : Khotbah - khotbah Menengah Sang Buddha*. 2015. Indra Anggara (Trans.). Jakarta: DhammaCitta Press.
- Maitriya, T. (2022). Analisis Ekonomi Syariah Menurut Sudut Pandang Agama Buddha. *Jurnal Agama Buddha Dan Ilmu Pengetahuan*, 7(2), 152–156. <https://doi.org/10.53565/abip.v7i2.308>
- Mukti, K. W. (2020). Wacana Buddha Dhamma. In *Suparyanto dan Rosad* (2015 (Vol. 5, Issue 3). Jakarta : Yayasan Karaniya.
- Ningtyas, R. F. (2023). Ekonomi Jalan Tengah Menurut Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. *Jurnal Ilmiah Kampus: Sati Sampajanna*, 13(2), 40–48.
- Suaidi. (2023). Actualization of Islamic Economic Philosophy as a Foundation in Building Welfare. *Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini*, 4(2). <https://doi.org/10.59059/tarim.v4i2.124>
- Wijoyo, H., & Nyanasuryanadi, P. (2020). Etika Wirausaha dalam Agama Buddha. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 11(2), 2531–2536. <https://doi.org/10.47927/jikb.v11i2.50>
- Zainol Hasan, & Mahyudi, M. (2020). Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(1), 24–34. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.206>
- Zinchenko, V., & Boichenko, M. (2022). Buddhist economics as a return to a rational model of economic management. *Journal of Philosophical Economics: Reflections on Economic and Social Issues*, XV(1), 227–244. <https://doi.org/10.46298/jpe.10032>